

SIARAN RRI
PENDEKATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI ERA OTONOMI DAERAH
JUMAT 3 FEBRUARI 2017

A. Pemahaman tentang istilah Pendekatan Pembangunan

Pendekatan (approach) adalah paradigma atau kerangka berpikir kita dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, khususnya dalam pembangunan pertanian. Dalam pembangunan di Indonesia pernah menerapkan berbagai pendekatan. Sangat menonjol di era Orde Baru, pendekatan pembangunan makro dilakukan secara terpusat. Berbagai kegiatan pembangunan di semua bidang pembangunan di kelola secara terpusat, khususnya oleh otoritas presiden sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Indonesia. Dengan berakhirnya era Orde Baru dan masuk era reformasi, terjadi perubahan secara mendasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan segala kebijakan pembangunannya.

B. Bentuk-bentuk Pendekatan Pembangunan Pertanian

Kita mengenal berbagai bentuk pendekatan pembangunan, yang diklasifikasikan atas berbagai dasar pengelompokan. Berikut beberapa contoh pendekatan berdasar berbagai hal:

1. Pendekatan pembangunan berdasar cakupannya, dikenal adanya:
 - a. Pendekatan makro
 - b. Pendekatan meso
 - c. Pendekatan mikro
2. Pendekatan pembangunan berdasar luasan wilayah, dikenal adanya:
 - a. Pendekatan nasional
 - b. Pendekatan regional (wilayah propinsi)
 - c. Pendekatan lokal (wilayah kabupaten/kota)
3. Pendekatan pembangunan berdasarkan pada metoda, dikenal adanya:
 - a. Metode massal (mass method)
 - b. Metode kelompok (group method)
 - c. Metode individual (individual method)
4. Pendekatan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan pemerintahan, dikenal:
 - a. Pendekatan kewenangan terpusat (sentralisasi)
 - b. Pendekatan kewenangan daerah (desentralisasi)

Masih banyak lagi berbagai pendekatan pembangunan yang lainnya. Selanjutnya dengan adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (dari Orde Baru ke era reformasi), banyak kewenangan yang sebelumnya dikelola oleh pusat sekarang dilimpahkan ke daerah. Yang kemudian perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah ini disebut Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Anonimous, 2003). Semangat Otonomi Daerah telah melahirkan tiga buah Undang-Undang penting, yakni UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan UU No 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotism

C. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pendekatan Pembangunan Pertanian

Setelah memasuki era Otonomi Daerah maka seiring itu, pendekatan pembangunan pun juga menyesuaikan, termasuk pendekatan pembangunan pertanian. Pendekatan pembangunan juga terdesentralisasi, dan pendekatan pembangunan pertanian saat ini menggunakan pendekatan Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kebijakan yang menekankan perbaikan sumber daya manusianya. Jadi hakekat pembangunan pertanian adalah merubah kualitas SDM, khususnya SDM para petaninya. Dengan merubah pola pikir, akan merubah kebiasaannya. Berarti merubah berbagai kebiasaan petani dalam kehidupannya sehari-hari yang menyebabkan mereka selama ini menjadi tidak atau kurang berdaya. Pembangunan pertanian dengan pendekatan masyarakat berarti menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatiannya dengan merubah kualitas SDM nya. Sehingga menempatkan mereka sebagai subjek pembangunan, pelaku utama pembangunan, sekaligus mereka pulalah yang semestinya menikmati hasil pembangunan. Masyarakat tani sebagai subyek pembangunan berarti mereka dilibatkan pada berbagai aktivitas pembangunan secara riil di masyarakat mulai dari awal hingga akhir. Petani diberi kesempatan secara luas untuk ikut berpartisipasi aktif pada berbagai kegiatan pembangunan pertanian. Partisipasi aktif yang dimaksud, tidak sekedar petani dilibatkan secara fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Petani haruslah berpartisipasi aktif utamanya dalam proses pengambilan keputusan dalam semua level kegiatan pembangunan. Petani dilibatkan untuk membuat keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi termasuk bagaimana distribusi hasil-hasil pembangunannya. Jelas bahwa pendekatan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan pertanian yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat sebagai manusia yang beradab.

D. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Lapangan

Pada kenyataannya antara konsep yang bagus seringkali berbeda dengan pelaksanaannya di lapangan. Dengan penerapan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan pembangunan di era Otonomi Daerah, sehingga semua orang berbicara bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat disebutnya sebagai pemberdayaan masyarakat. Walaupun terkadang substansi kegiatannya belum mengalami perubahan, masih dilakukan seperti pada masa Orde Baru dahulu. Cukup banyak kasus-kasus pembangunan yang dalam implementasinya masih jauh dari konsep dasar pemberdayaan masyarakat. Walaupun kita juga menemukan contoh-contoh kasus pemberdayaan masyarakat petani yang dipandang berhasil. Ternyata pemahaman dasar tentang konsep pemberdayaan masyarakat juga masih sangat beragam, bahkan perbedaan-perbedaan terjadi ada pada berbagai unsur masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

E. Berbagai Aktivitas dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kita temukan banyak kasus di lapangan, yang memahami kegiatan kelompok tani adalah hanya terbatas pada kegiatan utamanya saja. Sebagai ilustrasi: ada suatu kelompok tani padi, anggotanya hanya berfokus untuk melakukan berbagai aktivitas, rapat, tukar pikiran hanya berorientasi pada budidaya padi. Yang terpenting adalah bagaimana berusaha tani agar pada akhirnya ketika waktunya panen, petani bisa menjual hasil dan memiliki pendapatan yang baik dari panen padinya. Demikian juga ketika kita temukan kelompok tani jamur merang, maka semua aktivitas anggota dan pengurus kelompok berfokus pada budidaya jamur merang, bagaimana mereka harus mendapatkan bahan baku merang sebagai media tanamnya, dan bagaimana nantinya agar produksi jamurnya bisa terjual. Jika hanya kegiatan pokoknya yang mereka pelajari, maka ilmu

yang mereka dapatkan juga hanya terbatas pada kemampuan budidayanya saja. Sesungguhnya kelompok bisa dimaknai secara lebih luas. Kelompok tani merupakan media belajar bersama para anggotanya dalam berbagai hal. Pok tani bisa digunakan untuk mengembangkan motivasi anggota dalam bekerja sama ataupun dalam mencapai tujuan, atau sebagai belajar bagaimana seharusnya mengatur keuangan agar kegiatan berjalan sesuai dengan kondisi keuangan dan mampu mengembangkan usahanya. Kelompok juga bisa digunakan sebagai media untuk membangun saling percaya, kohesifitas kelompok, komitmen bersama, belajar berbagi tanggung jawab, berbagi kemanfaatan, dan sebagainya.

F. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah:

1. Ada tidaknya kesamaan persepsi tentang konsepsi pemberdayaan masyarakat dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat. Baik dari pihak pemerintah, para pendamping pemberdayaan masyarakat di lapangan, pengurus kelompok, anggota kelompok atau yang lainnya.
2. Ada tidaknya kekompakan kelompok. Kelompok yang kohesif dan terbangunnya sikap saling memahami diantara anggota, pengurus ataupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan akan berpengaruh pada efektivitasnya dalam pencapaian tujuan bersama
3. Ada tidaknya perbedaan orientasi atau tujuan dari individu-individu anggota ataupun pihak-pihak lain yang terlibat pemberdayaan dalam suatu kelompok tani. Jika ditemukan adanya pemahaman yang berbeda dan tujuan-tujuan individu dan itu cukup kuat ada dalam kelompok pemberdayaan, maka hal ini akan mengganggu dalam pencapaian tujuan bersama.
4. Ada tidaknya kepentingan-kepentingan individual yang terlalu menonjol dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adanya kepentingan individual, dan kalau ini mendominasi, maka akan mengganggu tercapainya tujuan bersama.
5. Kuat lemahnya komitmen bersama terhadap pencapaian bersama. Adanya kepentingan dan tujuan pribadi akan menurunkan komitmen bersama dalam pencapaian bersama dalam suatu kelompok pemberdayaan.
6. Lengkap tidaknya fasilitas, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Semakin lengkap berbagai peralatan dan sarana yang dapat disediakan akan lebih memudahkan bagi semua anggota untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diperlukan ke arah tujuan bersama.

G. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat semestinya tidak hanya diukur dari hasil yang dicapainya saja. Hendaknya indikator keberhasilan juga memperhatikan berbagai hal terkait dengan hakekat pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Sudah diungkapkan di depan bahwa pemberdayaan masyarakat sangat menekankan partisipasi anggota. Berarti bahwa semakin banyak anggota yang terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan berarti juga kegiatan pemberdayaan masyarakat dinyatakan lebih berhasil dibanding dengan kegiatan serupa yang hanya melibatkan sedikit anggota. Partisipasi anggota juga termasuk seberapa besar kualitas partisipasinya. Tentu saja partisipasi fisik dihargai lebih rendah jika dibanding dengan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Semakin banyak anggota kelompok tani yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat juga menggambarkan keberhasilan yang lebih baik. Semakin

banyak petani yang lebih mandiri karena mengikuti suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat juga dipandang kegiatan pemberdayaan tersebut lebih berhasil dibanding kegiatan serupa yang tidak menghasilkan kemandirian anggotanya. Sehingga banyak hal yang bisa dijadikan indikator untuk mengukur keberhasilan kelompok pemberdayaan masyarakat, di antaranya:

1. Banyaknya anggota yang bisa dilibatkan untuk berpartisipasi
2. Banyaknya anggota petani yang bisa merasakan manfaat ketika terlibat dalam proses belajar kelompok. Khususnya adalah belajar dalam pengambilan keputusan. Belajar mandiri untuk berpikir, bertindak dan berusaha.
3. Rendahnya dampak negatif yang terjadi sebagai konsekuensi dari tingginya proses interaksi sosial di antara mereka dalam pencapaian tujuan bersama.
4. Tentu saja hasil akhir, juga menjadi penentu keberhasilan. Peningkatan hasil material, seperti peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kepemilikan aset, berkembang usahanya, dan sebagainya.
5. Dan yang tidak kalah penting adalah terciptanya dinamika kelompok secara positif. Seperti terbentuknya norma-norma baru yang lebih kondusif, meningkatnya kepedulian antar anggota, meningkatnya komitmen bersama, toleransi yang baik, meningkatnya kedisiplinan bersama, dan sebagainya. Termasuk berkembangnya norma kompetitif secara sportif, memiliki *need of achievement* yang meningkat, saling menasehati, saling mensupport ke arah kemajuan, dsb.

Nara Sumber: Dr. Ir. Indardi, M.Si.

Kantor : Prodi Agribisnis, Fak. Pertanian UMY



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

SURAT KETERANGAN

No : 1179 / RRI - YK / 08 / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Umi Iryani, M.M.
NIP : 19630908 199303 2 002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I/ IVb
Jabatan : Kepala Bidang Program Siaran RRI Yogyakarta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Dr.Ir. Indardi, M.Si
NIP : 19651013199303 133 016
Jabatan : Dosen Agrobisnis Fakultas Pertanian UMY

Telah melaksanakan tugas sebagai narasumber :

Acara : KIPRAH DESA
Tanggal : 3 Februari 2017
Pukul : 19.30 s/d 20.00 WIB
Topik : Pendekatan Pembangunan Pertanian Era Otonomi Daerah

Demikian surat keterangan dibuat dengan sesungguhnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 10 Agustus 2017
An. Kepala RRI Yogyakarta
Kepala Bidang Siaran


Dra. Umi Iryani, M.M.
NIP 19630908 199303 2 002